

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Pemprov DKI Diminta Transparan

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, diminta meningkatkan transparansi anggaran terkait kebijakan-kebijakan. Desakan ini disampaikan anggota DPRD Jakarta, Justin Adrian.

"Terkait transparansi anggaran sebenarnya saya sudah menyinggung ini," ujar Justin, Kamis. Justin menuturkan, salah satu yang menjadi sorotannya, terkait pengadaan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang anggarannya mencapai 144 miliar.

Dia menyoroti data laman Smart Planning Budgeting RAPBD 2024 apbd.jakarta.go.id. Di situ, Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan, namun tidak tertulis detil lokasinya.

Kemudian, ditemukan belanja modal jembatan penyeberangan sebesar 144 miliar. Ini terbilang janggal dan bisa menjadi temuan nanti. Justin menilai, situs pemerintah provinsi DKI seperti apbd.jakarta.go.id itu terbilang kurang transparan. Harus lebih detil dalam membuka informasi kepada publik.

Sekretaris Fraksi PSI DKI itu menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dan kebijakan Gubernur perlu dikritisi. Terlebih, dia mendata masih banyak pos belanja yang perlu dikritisi. Harapannya, Gubernur di masa mendatang bisa lebih transparan dan mau lebih merinci anggaran.

"Kita mau ada legasi keterbukaan anggaran. Contohnya terkait JPO itu kan cuma satu dari sekitar 26 ribu pos belanja," katanya. Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membangun tujuh jembatan senilai 144-145 miliar tahun ini. "Kami mengajukan permohonan anggaran sebesar 144 miliar untuk tujuh jembatan," jelas Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Jakarta, Wiwik Wahyuni. ■ **Ant/G-1**